



KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Najmah Sa'adah

Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

najmah.master@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author.

Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memicu krisis ekonomi yang memukul sektor informal dan UMKM di Indonesia. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka ini menganalisis ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi melalui perspektif sosiologi pembangunan. Menggunakan pisau analisis teori Karl Marx, Max Weber, dan Émile Durkheim, hasil kajian menunjukkan bahwa ketahanan masyarakat dipengaruhi oleh adaptasi agensi, modal sosial, digitalisasi, dan kebijakan pemerintah. Namun, krisis juga mempertegas ketimpangan struktural yang memicu pemulihan asimetris (*K-shaped recovery*). Kesimpulannya, rekonstruksi pasca pandemi memerlukan reorientasi kebijakan menuju paradigma pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan komunitas untuk menciptakan resiliensi jangka panjang.

Kata kunci: Ketahanan ekonomi, pandemi COVID-19, sosiologi pembangunan, modal sosial, pembangunan inklusif.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic triggered an economic crisis that severely hit Indonesia's informal sector and MSMEs. This qualitative study applies a library research method to analyze post-pandemic community economic resilience through development sociology. Utilizing the theoretical lenses of Karl Marx, Max Weber, and Émile Durkheim, the findings indicate that resilience is driven by agency adaptation, social capital, digitalization, and government policies. However, the crisis also exacerbated structural inequalities, leading to an asymmetrical K-shaped recovery. In conclusion, post-pandemic reconstruction requires a policy reorientation toward an inclusive, sustainable, and community-based development paradigm to foster long-term resilience.

Keywords: Economic resilience, COVID-19 pandemic, development sociology, social capital, inclusive development.

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 bukan sekadar krisis kesehatan global, melainkan sebuah disrupsi total yang memicu transformasi mendalam pada seluruh sendi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kebijakan pembatasan mobilitas berskala besar seperti PSBB hingga PPKM demi menekan laju penyebaran virus berimplikasi langsung pada lumpuhnya aktivitas pasar, pemutusan hubungan kerja massal, serta penurunan daya beli secara drastis (Sihombing dkk., 2022). Krisis multidimensional ini tidak hanya memukul sektor korporasi besar, melainkan juga



menghantam pondasi ekonomi paling bawah, yaitu sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi jaring pengaman ekonomi nasional (SMERU Research Institute., 2021). Dalam bentang sejarah ekonomi Indonesia, sektor informal kerap diposisikan sebagai katup penyelamat ketika terjadi krisis, seperti yang terbukti pada krisis finansial tahun 1998 (Mubyarto, 2000). Namun, karakteristik pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi fisik secara langsung membalikkan anomali tersebut, menjadikan sektor informal sebagai kelompok yang paling rentan dan terdampak paling parah (Prasetyo, 2021). Penurunan mobilitas manusia secara drastis menghancurkan rantai pasok lokal dan pendapatan harian para pekerja informal, memaksa mereka masuk ke dalam lingkaran kerentanan baru (precariat) yang mengancam ketahanan subsistensi rumah tangga mereka (Pitoyo dkk., 2020). Kondisi pasca pandemi kemudian menghadirkan lanskap sosiologis yang kompleks. Proses pemulihan ekonomi (economic recovery) yang berjalan saat ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berkelindan dengan dinamika perubahan sosial, adaptasi teknologi, dan rekonfigurasi relasi kekuasaan di masyarakat (Cuerpo, 2022). Ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi berkembang menjadi sebuah fenomena sosiologis yang menarik untuk ditelaah, sebab resiliensi atau kemampuan bertahan suatu komunitas tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan modal finansial material semata, melainkan juga oleh kapasitas modal sosial dan kelembagaan yang mereka miliki (Fukuyama, 1995; Putnam dkk., 1993). Sosiologi pembangunan menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk membedah fenomena ini. Sebagai disiplin ilmu yang memfokuskan perhatian pada hubungan antara proses pembangunan, perubahan struktural, dan kesejahteraan sosial, sosiologi pembangunan melihat bahwa ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi dipengaruhi oleh bagaimana struktur sosial memfasilitasi atau menghambat akses individu terhadap sumber daya (Budiman, 1996). Kajian sosiologi pembangunan menolak determinisme ekonomi murni dan menekankan pentingnya faktor institusional, kultural, serta jaringan sosial dalam membentuk pola adaptasi masyarakat (Yustika, 2012). Teori-teori sosiologi klasik memberikan landasan ontologis yang kokoh untuk memahami ketimpangan dan integrasi sosial yang terjadi selama transisi pasca pandemi (Ritzer, 2012). Perspektif konflik Karl Marx, misalnya, sangat relevan untuk menganalisis bagaimana krisis ekonomi akibat pandemi memperlebar jurang pemisah antar kelas sosial dan memperparah alienasi pekerja (Marx dkk., 1990). Pandemi mengeksploitasi kerentanan struktural di mana pemilik modal besar memiliki kapasitas adaptasi dan bantalan ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kelas pekerja atau buruh harian yang ruang geraknya terbatas (Sayed & Peng, 2021). Di sisi lain, tindakan rasionalitas yang dikemukakan oleh Max Weber membantu kita memahami pilihan-pilihan strategi adaptasi yang diambil oleh pelaku ekonomi di tingkat mikro (Weber dkk., 1978). Pergeseran dari interaksi konvensional menuju digitalisasi ekonomi pasca pandemi dapat dilihat sebagai bentuk rasionalitas formal maupun substantif, di mana aktor-aktor sosial secara sadar mengubah metode tindakan instrumental mereka demi mempertahankan kelangsungan hidup ekonominya di tengah ketidakpastian pasar yang fluktuatif (Sihombing dkk., 2022). Selanjutnya, konsep solidaritas sosial dari Émile Durkheim memegang peranan krusial dalam menjelaskan bagaimana masyarakat membangun mekanisme pertahanan kolektif (Durkheim & Halls, 1997). Ketika institusi formal dan pasar mengalami kelumpuhan fungsional, integrasi sosial dan transformasi dari solidaritas mekanis menuju solidaritas organis menjadi perekat yang memunculkan gerakan resiliensi swadaya di tingkat komunitas, seperti aksi saling bantu antartetangga, lumbung pangan warga, dan kolektivitas ekonomi lokal (Sylvianie & Santoso, 2025). Pembangunan modern pun mengalami reposisi makna. Teori pembangunan konvensional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) terbukti gagal mengantisipasi kerentanan struktural

masyarakat bawah saat menghadapi guncangan eksternal (*external shocks*) (Edi, 2005). Oleh karena itu, sosiologi pembangunan modern menggeser fokusnya pada konsep pembangunan inklusif dan berkelanjutan, yang menempatkan manusia, kapabilitas agensi, serta keadilan spasial sebagai arus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional (Sen, 1999). Meskipun telah banyak studi yang membahas dampak ekonomi pandemi COVID-19, mayoritas literatur yang ada cenderung didominasi oleh pendekatan makro-ekonomi kuantitatif yang mengukur tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, atau penurunan omset secara statistik (Long Nguyen dkk., 2021). Terdapat sebuah research gap (celah penelitian) yang signifikan mengenai bagaimana dinamika relasi sosial, transformasi struktural sosiologis, dan eksistensi modal sosial beroperasi di tingkat komunitas dalam membentuk strategi ketahanan ekonomi yang tangguh di masa pasca pandemi (Lailaturrohmah & Fitrianto, 2022). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis kualitatif yang mendalam terhadap realitas sosiologis ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi di Indonesia. Melalui artikulasi teoretis yang mengintegrasikan pemikiran Marx, Weber, Durkheim, dan teori pembangunan kontemporer, artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi faktor-faktor struktural dan kultural yang melandasi proses pemulihan ekonomi masyarakat, mengevaluasi efektivitas kebijakan negara, serta memformulasikan arah pembangunan yang lebih berkeadilan sosiologis

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi, memahami, dan menginterpretasikan makna serta dinamika sosiologis dari fenomena ketahanan ekonomi masyarakat secara holistik (Creswell, 2014). Metode studi pustaka diaplikasikan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menyintesis data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah teoretis maupun empiris, mencakup buku teks sosiologi, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional, laporan berkala dari lembaga kredibel (seperti Bappenas, SMERU Research Institute, ILO, dan World Bank), serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahapan sistematis yang dikembangkan oleh (Zed, 2008), yaitu: (1) Penyiapan alat dan bibliografi kerja mengenai sosiologi pembangunan dan dampak pasca pandemi; (2) Menyusun zonasi membaca (organizing literatures) berdasarkan fokus bahasan dampak struktur, strategi adaptasi, modal sosial, dan tantangan pembangunan; (3) Mengadakan catatan penelitian (note-taking) menggunakan teknik kutipan langsung dan konseptualisasi teoretis; serta (4) Melakukan telaah kritis dan komparasi antar-sumber guna menjamin validitas data ilmiah. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi dan diorganisasikan ke dalam matriks analisis bertema.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik teoretis. Peneliti tidak hanya melakukan ringkasan deskriptif terhadap literatur, melainkan melakukan triangulasi teoretis dengan mengonseptualisasikan temuan empiris dalam data sekunder menggunakan pisau analisis teori sosiologi klasik (Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim) serta paradigma sosiologi pembangunan modern. Melalui interpretasi kritis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang mendalam, objektif, dan



komprehensif mengenai pola hubungan kausalitas antara struktur sosial, kebijakan pembangunan, dan tingkat ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak Pandemi terhadap Struktur Ekonomi Masyarakat

Analisis sosiologi pembangunan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 bertindak sebagai akselerator yang memperparah polarisasi dan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Menilik dari perspektif materialisme historis Karl Marx, krisis ekonomi akibat pandemi telah mempertegas garis demarkasi antara kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas pekerja (*proletar*). Ketika pembatasan sosial diberlakukan, korporasi besar dengan akumulasi kapital yang kuat memiliki daya tahan (*buffer capacity*) untuk melakukan restrukturisasi organisasi, mengadopsi otomatisasi teknologi, dan mempertahankan eksistensi bisnis mereka. Sebaliknya, kelas pekerja, buruh harian, dan pelaku UMKM berada dalam posisi struktural yang sangat rentan karena ketiadaan cadangan kapital yang memadai.

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi selama pandemi mengeksplorasi bentuk keterasingan (*alienasi*) pekerja dari sarana produksi mereka. Banyak tenaga kerja yang terpaksa berpindah dari sektor formal ke sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial, upah minimum, ataupun kepastian regulasi hukum. Proses "informalisasi ekonomi" ini menciptakan apa yang disebut Marx sebagai tentara cadangan industri (*industrial reserve army*) dalam skala baru, di mana persaingan memperebutkan pekerjaan informal yang serba terbatas menurunkan posisi tawar menawar buruh di hadapan pasar ekonomi kapitalistik pasca pandemi.

Secara struktural, pandemi juga memicu disrupsi pada rantai distribusi dan tatanan institusi ekonomi lokal. Kebijakan pembatasan sosial merusak pola interaksi ekonomi tradisional yang berbasis pada kedekatan spasial. Sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada kehadiran fisik konsumen—seperti pasar tradisional, transportasi umum, sektor pariwisata, dan industri kreatif mikro—mengalami kelumpuhan fungsional. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kesenjangan digital (*digital divide*), di mana masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi dan literasi digital semakin terpinggirkan dari sirkulasi ekonomi baru yang berbasis online. Kondisi ini menegaskan bahwa dampak pandemi tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi secara asimetris pada kelompok sosial yang secara struktural memang sudah marjinal sebelum krisis terjadi.

b. Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Mempertahankan Ketahanan Ekonomi

Menghadapi guncangan struktural tersebut, masyarakat tidak tinggal diam sebagai objek pasif, melainkan bertindak sebagai agen aktif yang mengembangkan berbagai strategi adaptasi demi mempertahankan kelangsungan hidup subsistensinya. Mengacu pada sosiologi tindakan sosial Max Weber, tindakan adaptasi ekonomi masyarakat pasca pandemi dapat diklasifikasikan ke dalam tipe rasionalitas instrumental (*zweckrational*) dan rasionalitas substantif (*wertrational*). Rasionalitas instrumental terlihat jelas ketika para pelaku usaha mikro melakukan pergeseran orientasi bisnis (*pivoting*) secara cepat dan pragmatis, misalnya dari usaha konveksi pakaian kasual beralih memproduksi

masker kain dan alat pelindung diri, atau pedagang makanan yang mendiversifikasi produknya menjadi makanan beku (*frozen food*) yang dipasarkan secara digital.

Transformasi digital di tingkat akar rumput ini mencerminkan pilihan tindakan rasional yang memperhitungkan efisiensi instrumen (*gadget*, internet, *e-commerce*) untuk mencapai tujuan material, yaitu pemulihan omset pendapatan yang hilang. Pelaku UMKM mulai mempelajari algoritma media sosial, memanfaatkan platform pesan instan untuk pemasaran peer-to-peer, dan mengadopsi sistem pembayaran nontunai (QRIS). Fleksibilitas agensi individu dalam mengonversi model bisnis konvensional menjadi digital ini menjadi pilar utama pembentuk resiliensi ekonomi di tingkat mikro.

Sementara itu, rasionalitas substantif mewujudkan dalam strategi adaptasi yang berlandaskan pada nilai-nilai kultural, moralitas kolektif, dan etika subsistensi. Di daerah perdesaan dan komunitas perkotaan padat, masyarakat menerapkan strategi nafkah ganda (*multi-livelihood strategies*) di mana seluruh anggota rumah tangga termasuk perempuan dan remaja—terlibat dalam aktivitas produktif informal. Penghematan konsumsi rumah tangga secara ekstrem, pengaktifan kembali sistem barter lokal, dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan mandiri (*urban farming*) diposisikan sebagai tindakan bernilai luhur demi menjaga keutuhan domestik. Pola adaptasi ini membuktikan bahwa batas-batas rasionalitas ekonomi di tingkat masyarakat bawah sering kali melekat erat (*embedded*) dalam sistem nilai sosial-budaya setempat.

c. Peran Modal Sosial dan Kebijakan Pemerintah

Dalam kerangka sosiologi pembangunan, keberhasilan pemulihan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara kekuatan internal masyarakat berupa modal sosial dan intervensi eksternal melalui kebijakan negara. Teori solidaritas sosial Émile Durkheim menyediakan perspektif yang tajam untuk menganalisis bagaimana kohesi sosial berfungsi sebagai jaring pengaman informal. Di tengah keterbatasan kapasitas bantuan logistik negara pada awal krisis, muncul reaktivasi solidaritas organik di tingkat komunitas. Masyarakat menghidupkan kembali pranata sosial gotong-royong dalam bentuk-bentuk baru yang adaptif, seperti gerakan "Jogo Tonggo" di Jawa Tengah, pendirian dapur umum swadaya, serta penggalangan dana digital (*crowdfunding*) skala komunitas.

Secara konseptual, modal sosial ini beroperasi melalui tiga level: jaringan pengikat (*bonding social capital*) di antara keluarga dekat, jaringan jembatan (*bridging social capital*) yang menghubungkan antarkelompok komunitas yang berbeda profesi, dan jaringan penghubung (*linking social capital*) yang mengaitkan komunitas dengan akses otoritas politik dan lembaga finansial. Keberadaan modal sosial yang kokoh terbukti mampu mereduksi biaya transaksi sosial, mencegah terjadinya konflik horizontal akibat kelangkaan sumber daya, serta mempercepat distribusi informasi mengenai peluang-peluang ekonomi baru di masa pasca pandemi.

Namun demikian, modal sosial tidak dapat berjalan sendirian tanpa topangan dari kebijakan makro pemerintah. Negara, sebagai pemegang otoritas pembangunan, merespons krisis dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Intervensi kebijakan ini meliputi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah bagi pekerja, insentif pajak bagi pelaku usaha, serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipermudah aksesnya. Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, kebijakan penargetan jaring pengaman sosial ini berfungsi untuk melakukan adaptasi sistemik agar subsistem ekonomi tidak mengalami disintegrasi total.



Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemerintah tidak luput dari kritik sosiologis. Beberapa kendala mendasar yang sering ditemukan di lapangan meliputi ketidakakuratan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memicu salah sasaran bantuan (*inclusion and exclusion errors*), birokrasi yang berbelit-bandar dalam pencairan stimulus UMKM, serta adanya asimetri informasi yang menyebabkan pelaku usaha di pelosok daerah tidak mendapatkan akses manfaat kebijakan secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan pasca pandemi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola institusi dan kemampuannya untuk bersinergi secara organik dengan modal sosial lokal yang sudah eksis di masyarakat.

d. Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi

Memasuki era pasca pandemi, arah pembangunan ekonomi Indonesia dihadapkan pada persimpangan krusial antara kembali ke pola pembangunan konvensional atau melakukan transformasi menuju paradigma pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang menghadang di depan mata adalah fenomena pemulihan ekonomi berbentuk huruf "K" (*K-shaped recovery*). Pola pemulihan ini mencerminkan kondisi di mana sektor-sektor berbasis teknologi tinggi, industri finansial besar, dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi mengalami akselerasi pemulihan yang sangat cepat. Sebaliknya, sektor industri padat karya, sektor informal tradisional, dan kelompok masyarakat rentan justru terus mengalami stagnasi bahkan penurunan kesejahteraan.

Ketimpangan asimetris ini memicu ancaman baru berupa kemiskinan struktural yang bersifat intergenerasional. Kesenjangan akses pendidikan daring selama pandemi, misalnya, berpotensi menurunkan kualitas modal manusia (*human capital*) anak-anak dari kelas sosial bawah dalam jangka panjang, yang pada gilirannya akan membatasi mobilitas sosial vertikal mereka di pasar kerja masa depan. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada platform *e-commerce* global tanpa disertai penguatan basis produksi lokal berisiko mengubah posisi pelaku UMKM domestik sekadar menjadi penyalur (*reseller*) barang-barang impor, yang justru memperlemah kedaulatan ekonomi nasional.

Meskipun tantangannya masif, lanskap pasca pandemi juga membuka prospek baru yang menjanjikan bagi rekonstruksi sosiologi pembangunan. Momentum ini dapat dijadikan titik balik untuk menerapkan strategi pembangunan berbasis pemberdayaan komunitas (*community-based development*). Penguatan ekosistem ekonomi digital yang demokratis, di mana platform teknologi dikembangkan secara kooperatif untuk memotong rantai tengkulak, dapat menjadi solusi bagi pemerataan pendapatan petani dan nelayan tradisional. Pembangunan masa depan harus mengintegrasikan aspek ketahanan sosial, keadilan ekologis, dan kemandirian ekonomi lokal secara seimbang, sehingga struktur ekonomi yang terbangun memiliki resiliensi sistemik yang kokoh dalam menghadapi potensi krisis global berikutnya.



IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dekonstruksi melalui lensa sosiologi pembangunan menegaskan bahwa ketahanan sektor informal bukan sekadar masalah fluktuasi mekanis pasar, melainkan produk dari relasi struktural kelas yang timpang. Pembangunan ekonomi perkotaan terbukti melanggengkan segregasi kelas yang tajam antara sektor formal kapitalistik dan sektor informal subsisten, di mana kelas pekerja informal (precariat) berada pada posisi struktural yang paling marjinal. Polarisasi ini semakin dipertegas oleh munculnya batasan kelas baru berupa kesenjangan digital (digital divide) yang memicu eksklusi bagi pelaku usaha tradisional dan melahirkan pola pertumbuhan yang asimetris. Kendati demikian, kelompok masyarakat akar rumput tidak menjadi objek pasif, melainkan mampu memobilisasi tindakan rasional dan kekuatan modal sosial berupa solidaritas organik di tingkat komunitas demi mempertahankan subsistensi ekonominya di tengah marjinalisasi struktural yang ada.

b. Saran

- Bagi Pemerintah: Menggeser orientasi dari pertumbuhan PDB makro ke pembangunan inklusif dengan memberikan proteksi hukum serta jaminan sosial yang adaptif bagi pekerja informal.
- Bagi Praktisi Pembangunan: Melakukan demokratisasi akses teknologi melalui pendampingan literasi digital bagi UMKM tradisional untuk memangkas kesenjangan digital.
- Bagi Masyarakat: Memperkuat kelembagaan modal sosial lokal (seperti koperasi warga) agar gerakan resiliensi komunitas memiliki daya dukung jangka panjang.
- Bagi Penelitian Selanjutnya: Menggunakan pendekatan empiris lapangan (etnografi) untuk merekam negosiasi agensi pekerja informal secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (1996). *Teori pembangunan dunia ketiga*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76lC_pOQC
- Cuerpo, C. (2022). Economic Recovery in the Age of COVID-19. *Intereconomics*, 57(1), 5-7. <https://doi.org/10.1007/s10272-022-1019-8>
- Durkheim, E., & Halls, W. D. (1997). *The Division of Labor in Society*. Free Press. <https://books.google.co.id/books?id=B955X3C-9E8C>
- Edi, S. (2005). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Bandung: Refika Aditama*.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press. https://books.google.co.id/books?id=Di_NMC0cAccC
- Lailaturrohmah, F., & Fitrianto, A. R. (2022). CITY RESILIENCE STRATEGIES IN DEALING WITH THE AFTERMATH OF THE COVID-19 PANDEMIC: USING SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 80-87.



<https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>

Long Nguyen, V. K., Hanh Le, T. M., Chau Tran, T. M., Hien Le, T. T., Mai Duong, T. N., Le, T. H., Nguyen, T. S., & Vo, N. H. (2021). Exploring the impact of pandemic on global economy: Perspective from literature review. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 29(3), 2033-2087. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.3.29>

Marx, K., Fowkes, B., Mandel, E., & Fernbach, D. (1990). *Capital: A Critique of Political Economy* (Nomor v. 1). Penguin Publishing Group. <https://books.google.co.id/books?id=E4fNkWcvs7oC>

Mubyarto. (2000). *Membangun sistem ekonomi*. BPFE. <https://books.google.co.id/books?id=325DAAAACAAJ>

Pitoyo, A. J., Aditya, B., & Amri, I. (2020). The impacts of COVID-19 pandemic to informal economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison. *E3S Web of Conferences*, 200. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020003014>

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nonetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7>

Ritzer, G. (2012). Ecological Theory. In *Encyclopedia of Social Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781412952552.n87>

Sayed, A., & Peng, B. (2021). Pandemics and income inequality: a historical review. *SN Business & Economics*, 1. <https://doi.org/10.1007/s43546-021-00059-4>

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=NQs75PEa618C>

Sihombing, T., Lubis, B., Sihombing, E., Waruwu, L., & Henuk, Y. L. (2022). Reviewing the Impact of Covid-19 Pandemic on the Current Indonesian Economy. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642(Icoposdev 2021), 421-424. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.064>

SMERU Research Institute. (2021). Laporan Tahunan 2021 Perhilitan. In *The SMERU Research Institute*. <https://www.wildlife.gov.my/index.php/en/penerbitan/108-annual-report>

Sylvanie, L., & Santoso, F. S. (2025). Solidaritas Sosial dan Resiliensi Masyarakat Kajen Bantul Pasca Covid-19. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 513-532. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.1925>

Weber, M., Roth, G., & Wittich, C. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Nomor v. 2). University of California Press. <https://books.google.co.id/books?id=MILOksrhgYC>

Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi kelembagaan: Paradigma, teori dan kebijakan*.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*.